



***Gaduh Ekonomi Politik di
Media Sosial***

2019-2024

Timeline Isu dan Blunder

2020-2024

▶ Ekonomi
 ▶ Ekopollukam
 ▶ Negatif
 ▶ Positif
 ▶ Kabinet
 ▶ Presiden

ISU

<p>▶ Januari-Desember Kasus Korupsi Jiwasyaya</p> <p>▶ 6-10 Oktober Penolakan RUU Cipta Kerja/ Omnibus Law</p> <p>▶ 3-10 November Resesi Ekonomi</p> <p>▶ 26 November Kasus Korupsi Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo</p> <p>▶ 30 November – 27 Desember Kasus Pengadaan Tas Bansos Gibran</p> <p>▶ 26 November Vaksin</p>	<p>▶ 16 – 23 Februari Polemik PP UU Ciptaker</p> <p>▶ 1-28 Maret Impor Beras dan Garam</p> <p>▶ 1 – 25 Juni Dana Haji</p> <p>▶ Pajak Pendidikan dan Sembako</p> <p>▶ Anggaran Pertahanan Rp1,7 Kuadriliun</p> <p>▶ 20 Februari - 21 Maret Kelangkaan Minyak Goreng</p>	<p>▶ 2 – 9 April & 11 April Aksi Mahasiswa 11 April Isu: Penolakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, kenaikan harga bahan pokok dan bbm</p> <p>▶ 22-25 April Pelarangan Ekspor CPO</p> <p>▶ 24 – 25 Agustus Kenaikan Harga BBM</p> <p>▶ 12-15 September Penghapusan Daya Listrik 450 A</p> <p>▶ 3-28 September Konversi Kompor Listrik</p>	<p>▶ 30 Desember 2022- 3 Januari 2023 Polemik Perppu UU Cipta Kerja</p> <p>▶ 19- 28 Januari Usulan Kenaikan Dana Haji</p> <p>▶ 25- 28 Februari Polemik Ditjen Pajak</p> <p>▶ Januari-Maret 2023 Larangan Impor Baju Bekas</p>	<p>▶ 29 September 2023- Januari 2024 Demo Kenaikan UMP oleh buruh</p> <p>▶ 1 Januari - 30 September Polemik Kelas Menengah</p> <p>▶ 6 Juni Demo penolakan Tapera dan kenaikan UKT</p> <p>▶ 28 Agustus-1 September Polemik Subsidi KRL</p> <p>▶ 29 Agustus Aksi demonstrasi Ojek Online</p> <p>▶ 24 September Unjuk rasa Serikat Tani Indonesia dan Buruh di Gedung DPR RI</p>
--	--	--	---	---

BLUNDER

2020	2021	2022	2023	2024
<p>▶ Februari Muhadjir Effendy: Usul orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan</p> <p>▶ Februari Wishnutama:Rencana alokasi Rp72 M untuk media dan influencer untuk promosi wisata</p> <p>▶ Februari Insentif untuk maskapai</p> <p>▶ April Yasonna Laoly: Usul bebaskan napi koruptor lansia karena Covid-19</p> <p>▶ Juli Luhut B Pandjaitan: Indonesia butuh tenaga kerja asing karena kualitas SDM lokal tidak cukup</p> <p>▶ Agustus Mahfud MD: Bulan depan 99% hampir pasti Indonesia alami resesi</p>	<p>▶ November Luhut B Pandjaitan & Erick Thohir: Bisnis PCR</p> <p>▶ November Polemik data pidato di Konferensi Tingkat Tinggi perubahan iklim COP26</p> <p>▶ November Siti Nurbaya: Pembangunan Jokowi tak boleh berhenti atas nama deforestasi</p>	<p>▶ Januari Mandat Presiden: Kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam berbagai layanan publik</p> <p>▶ Februari Mahfud MD: Klaim penambangan di Desa Wadas tidak melanggar hukum</p> <p>▶ Februari Ida Fauziyah: Membatasi komentar di akun Instagram pribadi karena kritik atas aturan baru pencairan JHT</p> <p>▶ Maret Muhammad Lutfi: Akui tak kuasa kontrol mafia minyak goreng</p> <p>▶ Mei Luhut B Pandjaitan: Tugas baru Luhut atur kelangkaan minyak goreng, disebut "Menteri Superior"</p> <p>▶ Juli Johhny G Plate: Aturan PSE Kominfo, pemblokiran situs, ketidakhadiran Kominfo</p>	<p>▶ Januari Mengizinkan wisatawan asal Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia pada saat kasus Covid meningkat di negara itu</p> <p>▶ Januari Terbitkan Perppu Cipta Kerja karena ancaman-ancaman ketidakpastian global</p> <p>▶ Januari Abdullah Azwar Anas: Anggaran program kemiskinan capai Rp 500 T tetapi terserap untuk studi banding dan rapat</p> <p>▶ Juni Luhut B Pandjaitan: Wacana audit LSM</p> <p>▶ Agustus Erick Thohir: Rencana merger maskapai pelat merah dan kesalahan desain longspan LRT</p> <p>▶ Agustus Meminta penerima LPDP pulang ke Indonesia meskipun gaji lebih rendah</p> <p>▶ September Budi Arie: Usul pemungutan pajak untuk judi online</p> <p>▶ September Budi Arie: Ingin tunjuk Wulan Guritno sebagai duta judi online</p>	<p>▶ Januari Prabowo: Boleh menerima politik uang</p> <p>▶ Juni Muhadjir Effendy: Korban judi online bisa menjadi penerima bansos</p> <p>▶ Juli Muhadjir Effendy: Dukung mahasiswa gunakan pinjol untuk bayar UKT</p> <p>▶ Juli Luhut B Pandjaitan: Sebut OTT KPK 'kampungan'</p> <p>▶ September Sedimen dan pasir laut adalah sesuatu yang berbeda</p>

Social Network Analysis Penolakan Omnibus Law



Media dan Kontra Pemerintah (77,36 %)

Top Hashtag	Influencer
-	@CNNIndonesia
-	@tempodotco
-	@TirtolD
-	@detikcom
-	@geloraco
-	@VIVAcoid
-	@kafiradikalis
-	@ustadtengkuzul
-	@podoradong
-	@hnurwahid

#gagalkanomnibuslaw
 #jegalsampaigagal
 #jegalsampaibatal
 #dprrikhianatirakyat
 #mositidakpercaya
 #batalkanomnibuslaw
 #tolakomnibuslaw
 #mositidakpercaya

Network graph visualization showing connections between accounts and hashtags. Nodes include @CNNIndonesia, @tempodotco, @TirtolD, @detikcom, @geloraco, @VIVAcoid, @ustadtengkuzul, @podoradong, @hnurwahid, #gagalkanomnibuslaw, #jegalsampaigagal, #jegalsampaibatal, #dprrikhianatirakyat, #mositidakpercaya, #batalkanomnibuslaw, #tolakomnibuslaw, #mositidakpercaya.

Kontra Omnibus Law / K-pop (13,03 %)

Top Hashtag	Influencer
#gagalkanomnibuslaw	@syaayounn
#jegalsampaigagal	@holoyushine
#jegalsampaibatal	@hellothismee
#dprrikhianatirakyat	@Zhouxxxxxxx
#mositidakpercaya	@llpyt09
#tolakruuciptakerja	@kshllrtshk
#batalkanomnibuslaw	@gummyylix
#tolakomnibuslaw	@peewpeewchuu
#tolakomnisbuslaw	@rencurves
#mahasiswabergerak	@joloniore

Pro Omnibus Law / Pendukung Pemerintah (9,55 %)

Top Hashtag	Influencer
-	@Dennysiregar7
-	@digeembokFC
-	@seruanhl
-	@DiniHrdianti
-	@TRANSTV_CORP
-	@Chaterinee_08
-	@Rizmaya__
-	@AriestaRiico_
-	@silentreadeer
-	@NayDonuts

Kampanye Tolak Omnibus Law datang dari K-pop. Penolakan dari kelompok kontra pemerintah masih ada, namun tagar yang dinaikkan bukanlah tagar dominasi pada bulan Oktober. Pada kubu pro pemerintah tidak ditemukan tagar yang penggunaannya sebesar tagar pada kelompok K-pop.



Nodes : 17.919
Edges : 66.346
Akun : 17.076
Post : 58.350

Social Network Analysis

“Pengesahan Perppu UU Cipta Kerja”

01 Januari – 31 Maret 2023

#lawankrisisglobal

Klaster Pro Pengesahan UU Cipta Kerja (9,31%)

Mayoritas narasi berkaitan dengan dampak positif dari UU Cipta kerja seperti peningkatan investasi, kemudahan usaha, pemberdayaan UMKM, dan mendorong ekonomi yang berkelanjutan serta alur pengesahan UU sudah sesuai konstitusi.

#lawankrisisglobal	@mohmahfudmd
#uuciptakerja	@lpnkarangintan
#ciptakersejahterakanrakyat	@golkarpedia
#bangkitbersamaet	
#ciptakermembangunindonesia	
#kumhamsusel	

#ciptakermembangunindonesia
#dukunguuciptaker
#ciptakersejahterakanrakyat

#uuciptakerja

Klaster Kontra Pengesahan UU Cipta Kerja (90,69%)

Mayoritas narasi berisi tentang penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja seperti aksi Mahasiswa turun ke jalan, penolakan pengesahan UU oleh anggota DPR fraksi Demokrat dan PKS, serta pengesahan UU Cipta kerja yang dinilai melanggar konstitusi karena bertentangan dengan putusan MK.

#korantempo	@panca66
#esai	@ProfesorSuteki
#terbaru	@CNNIndonesia
	@OposisiCerdas
	@geloraco
	@Dandhy_Laksono
	@Ataya_Alfad
	@SuwandaBen
	@RamliRizal
	@madisnur

Pro 9,31%

Kontra 90,69%

Nodes : 190.823
 Edges : 752.822
 Akun : 181.291
 Post : 420.156

Social Network Analysis "Resesi Ekonomi"

Data Mining: 01 Januari 2022 – 09 Desember 2022

Klaster SJW & Kontra Pemerintah (66,40%)

Cuitan terkait kekhawatiran resesi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, himbuan terhadap pemerintah untuk bisa mengantisipasi krisis pangan serta resesi akibat inflasi dunia, anjuran kesiapaan terhadap pemerintah dalam mengatasi penurunan surplus perdagangan.

#korantempo	@SBYudhoyono
#asalmangap	@eternaLune
#km50roadtoden Haag	@Okihita
#tolakibukotabaru	@jek__
#liberte	@PartaiSocmed
#dukungmahasiswamelawan	@JukiHoki
#rakyatmonitor	@ChatibBasri
#21aprilgerakanpeoplepower	@catchmeupid
#21apriljokowitumbang	@RamliRizal
#nalar	@msaid_didu

Klaster Pro Pemerintah (15,92%)

Narasi terkait defisit APBN sudah menurun secara konsisten sejak 2020, peluang risiko resesi Indonesia sangat kecil, rasio utang BUMN turun, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% dan tidak terdampak krisis global, perkuat UMKM redam dampak resesi.

#bangkitbersamaet	@jokowi
#airlanggauntukindonesia	@prastow
#ekonomimeroket	@Leonita_Lestari
#jokowipresidenku	@KemenkeuRI
#bangkitlebihkuat	@kartarahardja
#pembangunanuntukkrakyat	@ChusnulCh__
#bantuanbbmuntukkrakyat	@hasyimmah
#bltbbmtepatasaran	@pengarang_sajak
#subsiditepatasaran	@Mentimoen
#pidatopresiden2022	@HASapardan



Klaster Media (10,18%)

Cuitan terkait inflasi terjaga di 5,71 Persen, jaminan RI bebas krisis dan resesi, dampak dari ancaman resesi, kesiapan dalam menghadapi resesi global di Indonesia, penerapan kebijakan pengaturan defisit APBN di bawah 3 persen.

#ekonomi	@CNNIndonesia
#undang	@detikcom
#skandal	@cnbcindonesia
#indonesia	@KompasTV
#keuangan	@kompascom
#lengkapcepatberitanya	@GanjaranApp
#jokowi	@VIVAcoid
#lanyalla	@tvOneNews
#anti	@Bisniscom
#ekonomiindonesia	@kumparan

Pro 19,34%

Kontra 80,66%

Social Network Analysis "Polemik Minyak Goreng"

Nodes : 154.910
Edges : 729.795
Akun : 145.810
Post : 663.927

Klaster Kontra Pemerintah (51,06%)

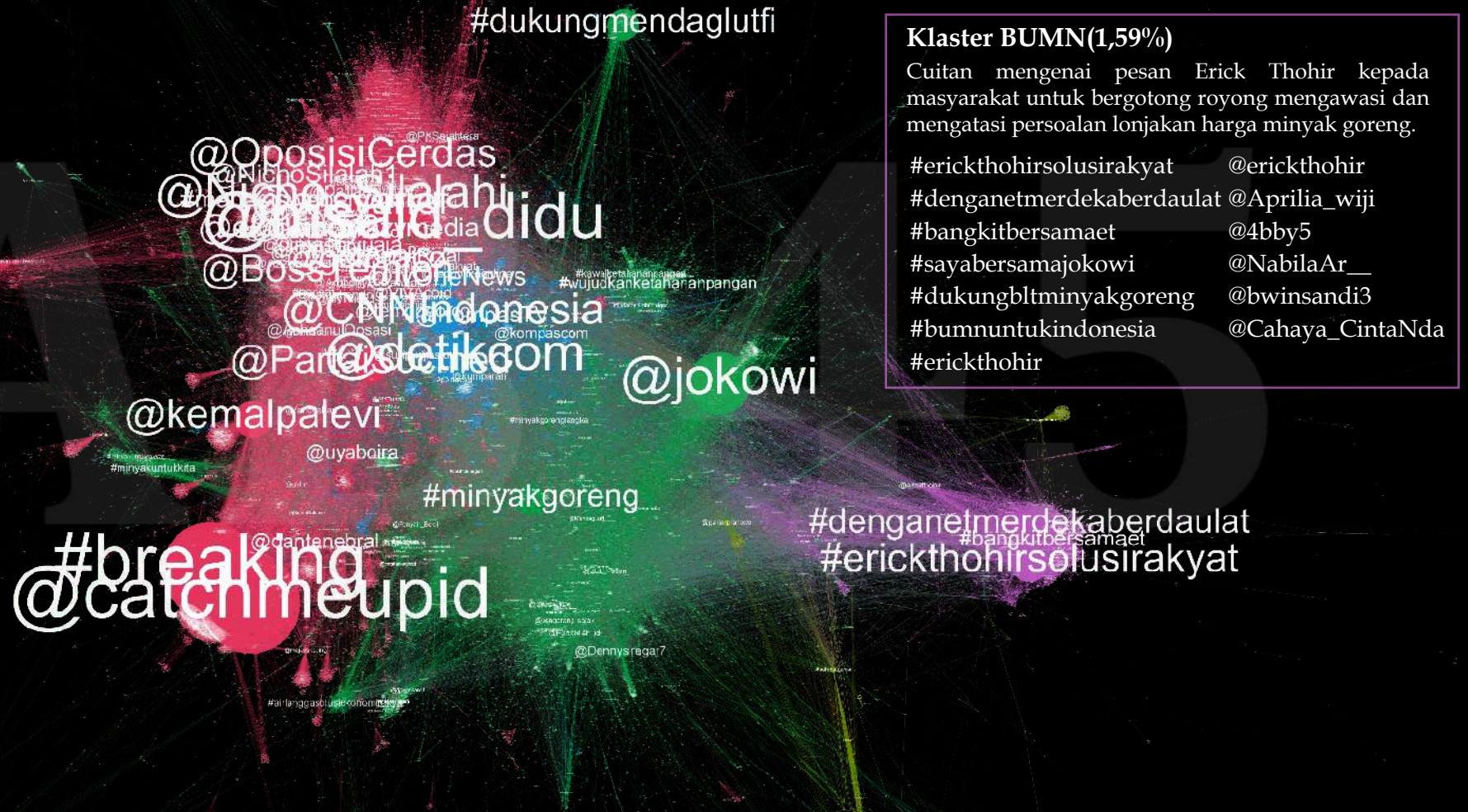
Narasi mengenai kritikan terhadap pemerintah terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana tersangka dugaan korupsi impor minyak goreng.

#breaking	@catchmeupid
#mahasiswabergerak	@msaid_didu
#hensat	@Nicho_Silalahi
#tangkapkartelminyagoreng	@OposisiCerdas
#hargamahal_rezimbebal	@kemalpalevi
#prayfordoktersunardi	@alisyarief
#majalahtempo	@PartaiSocmed
#islamkaffah	@BossTemlen
#stoppanicbuying	@geloraco
#usutmafiaminyagoreng	@ekowboy2

Klaster Pro Pemerintah (26,79%)

Narasi mengenai operasi pasar dalam meninjau harga dan ketersediaan minyak goreng, strategi Jokowi melarang ekspor berhasil turunkan harga minyak goreng, pemantauan dan pengawasan Polri dari pendistribusian minyak goreng curah

#dukungmendaglutfi	@jokowi
#minyagoreng	@Dennysiregar7
#wujudkanketahananpangan	@P3nj3l4j4h_id
#minyakuntukita	@ChusnulCh__
#kawalketahananpangan	@pengarang_sajak
#airlangasolusiekonomirakyat	@ZUL_Hasan
#minyagorenglangka	@Penyair_Berdiri
#polripresisi	@ridwankamil
#minyakuntukrakyat	@MendagLutfi
#jokowi	@Kemendag



Nodes : 240.064
Edges : 2.573.413
Akun : 223.668
Post : 1.865.258

Social Network Analysis "Kenaikan Harga BBM"

Data Mining: 01 Januari 2022 – 09 Desember 2022

Klaster Pro Kenaikan BBM (29,14%)

Terkait isu di era Jokowi kenaikan BBM hanya sekitar 30%, sedangkan di era SBY kenaikan BBM mencapai 360%. Kebijakan pemerintah memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena imbas kenaikan harga BBM. Harga pertamax terlalu murah menurut staff khusus BUMN. Kenaikan BBM untuk kebaikan masyarakat.

#bantuanbbmuntukrakyat	@energitodayID
#bltbbmtepatasar	@jokowi
#subsiditepatasar	@LekMarteg
#semuademikesejahteraan	@Amaygedeng
#cerdaspakaibbm	@vynval
#bijakpakaibbm	@ChanaRangers
#pertamina	@meyyoungg
#energytoday	@Wiznu_Prayoga
#energytodayid	@aiyrinrv
#indonesiasatuhargabbm	@yeributkuy

#bltbbmtepatasar
#bantuanbbmuntukrakyat

#bijakpakaibbm
#semuademikesejahteraan
#subsiditepatasar

Klaster Kontra Kenaikan BBM (69,9%)

Terjadi demo penolakan kenaikan harga BBM di berbagai wilayah, serta isu BBM swasta turun tetapi pemerintah malah menaikkan harga BBM.

#batakkenaikanbbm	@QaillaAsyiqah
#tolakkenaikanbbm	@RamliRizal
#pkstolakkenaikanbbm	@OposisiCerdas
#fraksipksdpri	@geloraco
#demokratbersamarakyat	@msaid_didu
#dukungseptemberbergerak	@detikcom
#islamkaffah	@CNNIndonesia
#breakingnews	@ekowboy2
#tolakkenaikanhargabbm	@abu_waras
#bbmnaikrakyatrevolusi	@alisyarief

Pro 29,14%

Kontra 69,90%

Netral 0,96%

Nodes : 51.272
Edges : 97.343
Akun : 50.846
Post : 90.648

Social Network Analysis

"Kelas Menengah"

Data Mining: 1 Januari-30 September 2024

Klaster Pendukung Pasangan AMIN (16,03%)

Klaster ini lebih mengarah pada diskusi mengenai posisi kelas menengah dalam konteks politik, terutama menjelang Pilpres 2024. Dalam klaster ini mayoritas didominasi para pendukung pasangan AMIN yang mana salah satu program dari pasangan AMIN memikirkan kesejahteraan bagi kelompok menengah.

#debatcapres2024	@glrhn
#aniesfinalstage	@MuhadklyAcho
#debatcapresterakhir	@thelandbe4time
#tomlebong	@dayatpiliang
	@imanlagi
	@benhan
	@AnggaPutraF
	@fairy_ley87

Klaster Kritik Pemerintah (68,45%)

Mayoritas narasi dalam klaster ini berupa kritik terhadap pemerintah, terutama terkait pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesenjangan sosial sangat kuat. Cuitan dalam kelompok ini menekankan dampak buruk dari inflasi, mahal biaya hidup, dan ancaman penurunan jumlah kelas menengah.

#adadikompas	@hrdbacot
#kawalkeputusanmk	@WidasSatyo
#investigasi	@JukiHoki
#yaakubakaldibaca	@kadyasandya
#jurnalismedata	@cnbcindonesia
#kelasmenengah	@ourobolu
#ekonomi	@goraici
#indonesiakuat	@ardisatriawan
#athread	@NarasiNewsroom
#ekonomikuat	@BILLYKHAERUDIN



@hrdbacot
@WidasSatyo
@ourobolu
@glrhn
@kadyasandya
@JukiHoki
@thelandbe4time
#aniesfinalstage
#debatcapresterakhir
#debatcapres2024
@dayatpiliang
@ardisatriawan
@cnbcindonesia
@NarasiNewsroom
@tempobisnis
@tempodotco

Klaster Pro & Kontra Pemerintah (2,88%)

Dalam klaster ini terjadi diskusi terkait isu "kelas menengah" yang pro pemerintah dan kritik pemerintah. Kelompok yang pro lebih menekankan masih banyak orang-orang yang membeli produk elektronik mahal, sedangkan kritik terhadap pemerintah menekankan pada isu inflasi, kenaikan pajak, dan ekonomi yang melemah.

#ganjarmahfud2024	@AndrewsTjan
#sahabatganjar	@MARQUEZ_93
#judolbinasa	@Darkie72006006
	@saiful_mujani
	@paman_samsul
	@366987179
	@kurawa
	@TOM5helby
	@Aryprasetyo85
	@1331650559518990336

Klaster Media (12,38%)

Narasi dalam klaster ini banyak menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah lebih banyak memperhatikan kaum elit dan masyarakat miskin, sementara kelas menengah tertinggal. Di sini juga terlihat kekhawatiran akan kebijakan ekonomi yang dianggap akan lebih membebani kelas menengah, terutama dengan adanya kenaikan pajak, PHK naik, kritik penghamburan anggaran IKN dan kebijakan lainnya.

#tempobisnis	@tempodotco
#kawalputusanmk	@anonjawa
#lockerroomtimnas	@CNNIndonesia
	@geloraco
	@LexWu_13
	@UbahBareng
	@5teV3n_Pe9eL
	@pakmul63
	@elisa_jkt
	@BudiBukanIntel

Dalam klaster ini terindikasi buzzernya pemerintah karena narasi yang digaungkan dan timeframe setiap postingan hampir sama.



Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi

8 Oktober 2024

Ekonomi Politik

Laboratorium Indonesia 2045

Potret Kelas Menengah Indonesia

Arti Penting Kelas Menengah

Ekonomi

1. Kontributor pajak terbesar
2. Penjaga tingkat konsumsi rumah tangga
3. Mesin transformasi ekonomi
4. Sumber inovasi



Politik

1. Konstituen terbesar dalam pemilihan umum
2. Masyarakat yang kritis
3. *Watchdog* praktik politik yang berlangsung

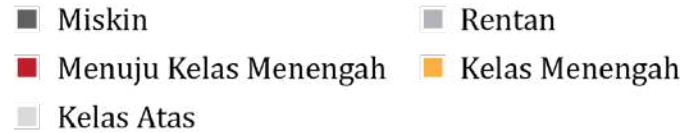


Indonesia Emas 2045

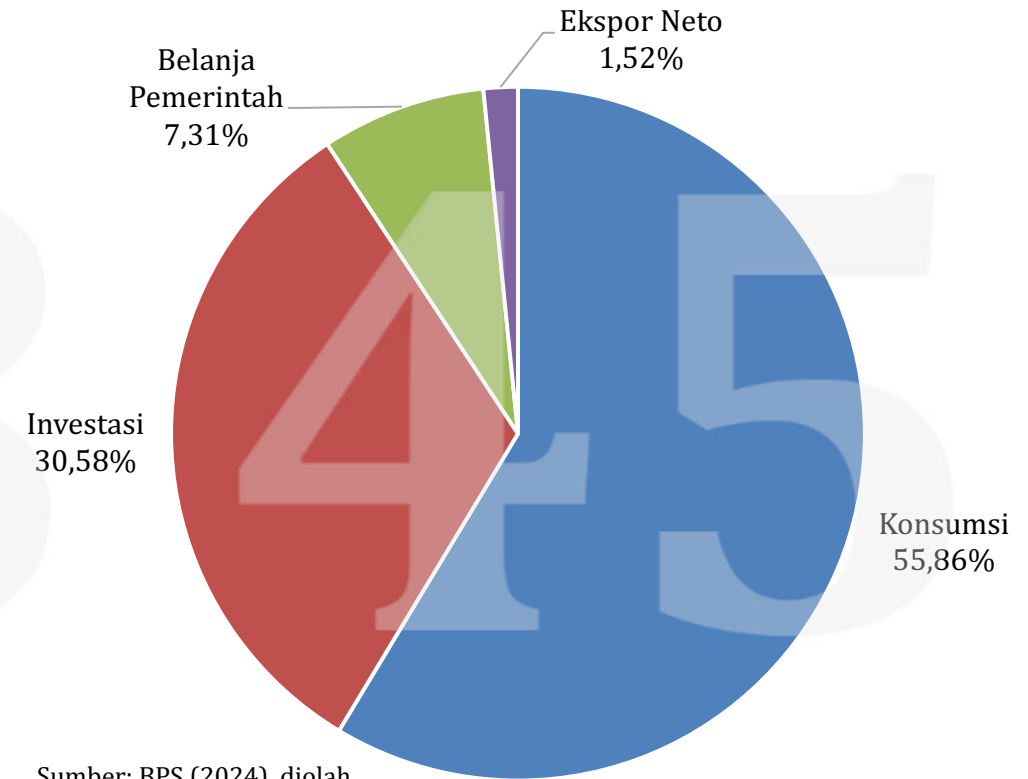
Indonesia Emas 2045 merupakan mimpi besar bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang sarat kondisi **ekonomi yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan demokrasi yang matang** melalui empat pilar (1) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) Pemerataan pembangunan; dan (4) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Adapun, kelompok kelas menengah merupakan kelompok memegang **peran penting** untuk mencapai tujuan tersebut.

Kontribusi Kelas Menengah Bagi Ekonomi Indonesia

Kontributor Pajak Berdasarkan Kelas Sosial



Komponen PDB Indonesia Q2 2024

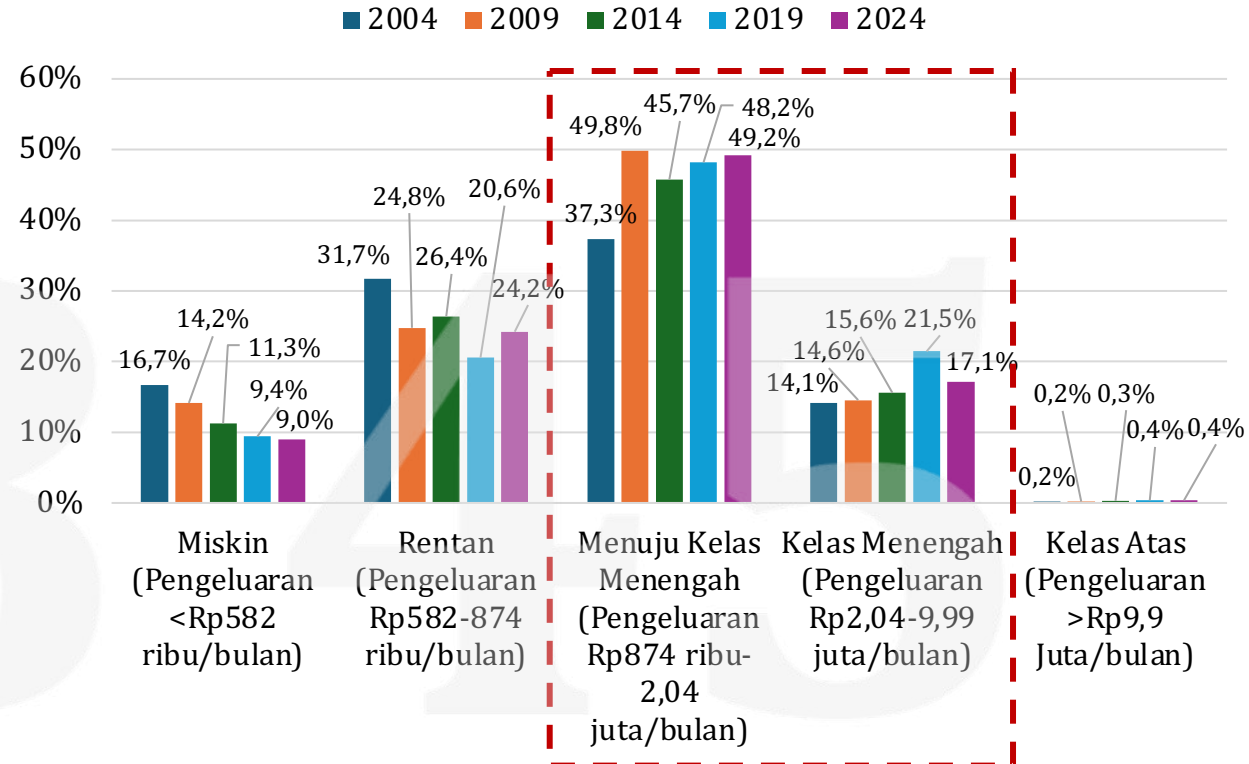
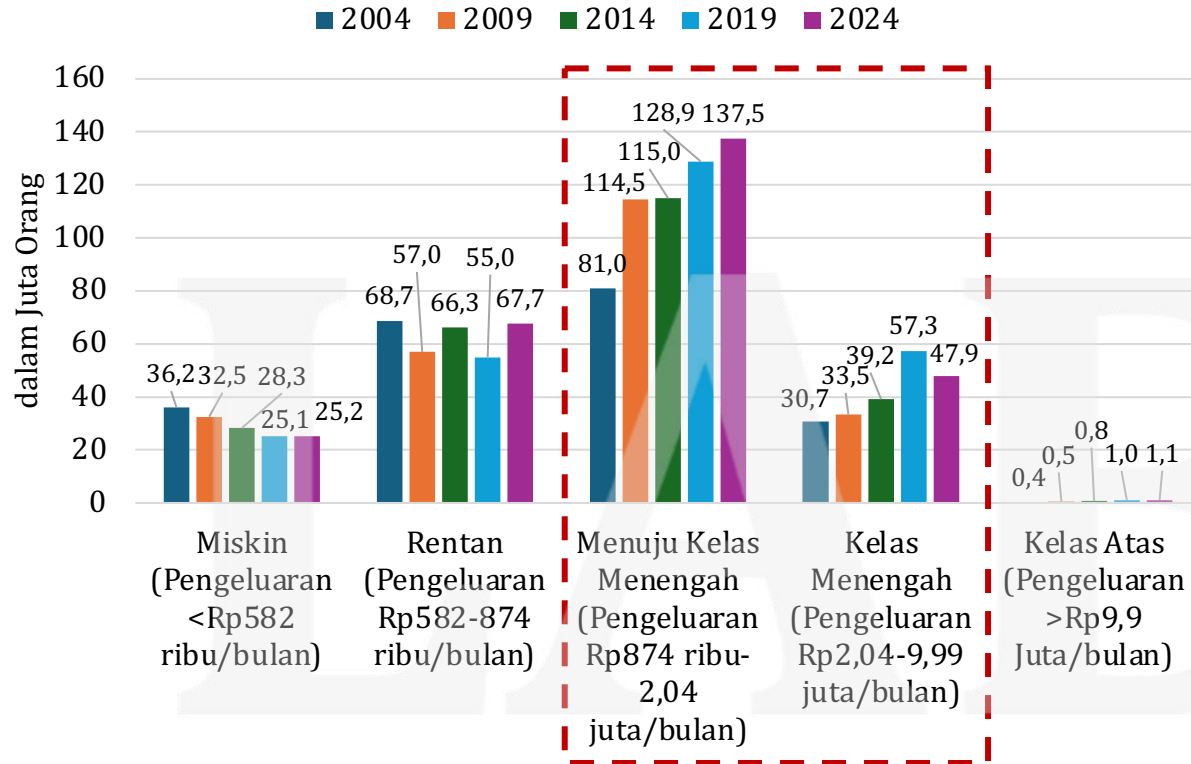


Sumber: LPEM FEB UI (2024)

Sumber: BPS (2024), diolah

Kelas menengah Indonesia **menjadi tulang punggung perekonomian** nasional. Selain sebagai kontributor pajak terbesar, kelas menengah juga menjadi konsumen terbesar pada perekonomian Indonesia. Variabel konsumsi dalam PDB masih menjadi kontributor terbesar yang mencapai **55,86% pada Q2-2024**. Selanjutnya, kelas menengah dan calon kelas menengah berkontribusi pada 2023 hingga **82% dari total konsumsi**.

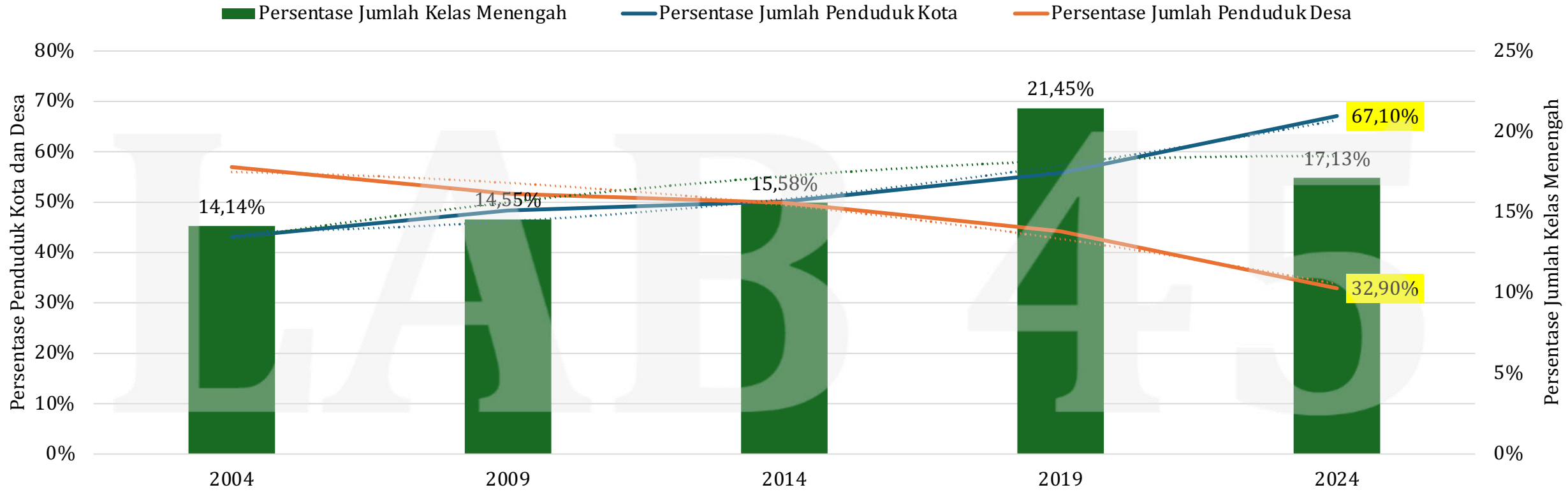
Situasi Kelas Menengah di Indonesia berdasarkan BPS (2024)



Ketika dilihat dengan pembagian kelas sosial-ekonomi dari acuan Bank Dunia yang diperbarui dengan garis kemiskinan nasional di tahun 2004 hingga 2024, kenaikan jumlah penduduk kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle-class*) dan menengah berlangsung selama 2004 hingga 2019. Akan tetapi, jumlah dan persentase kelas menengah selama tahun 2019 hingga 2024 menurun dari 57,3 juta orang menjadi 47,9 juta orang. Jumlah penduduk miskin dan rentan juga meningkat selama lima tahun terakhir karena kenaikan garis kemiskinan dari Rp138.803/bulan (2014) menjadi Rp425.250/bulan (2019) dan akhirnya Rp582.932/bulan (2024). Ini membuktikan bahwa ada kejenuhan dari efektivitas pengentasan kemiskinan dan melemahnya kenaikan kelas penduduk menuju ke kelas menengah.

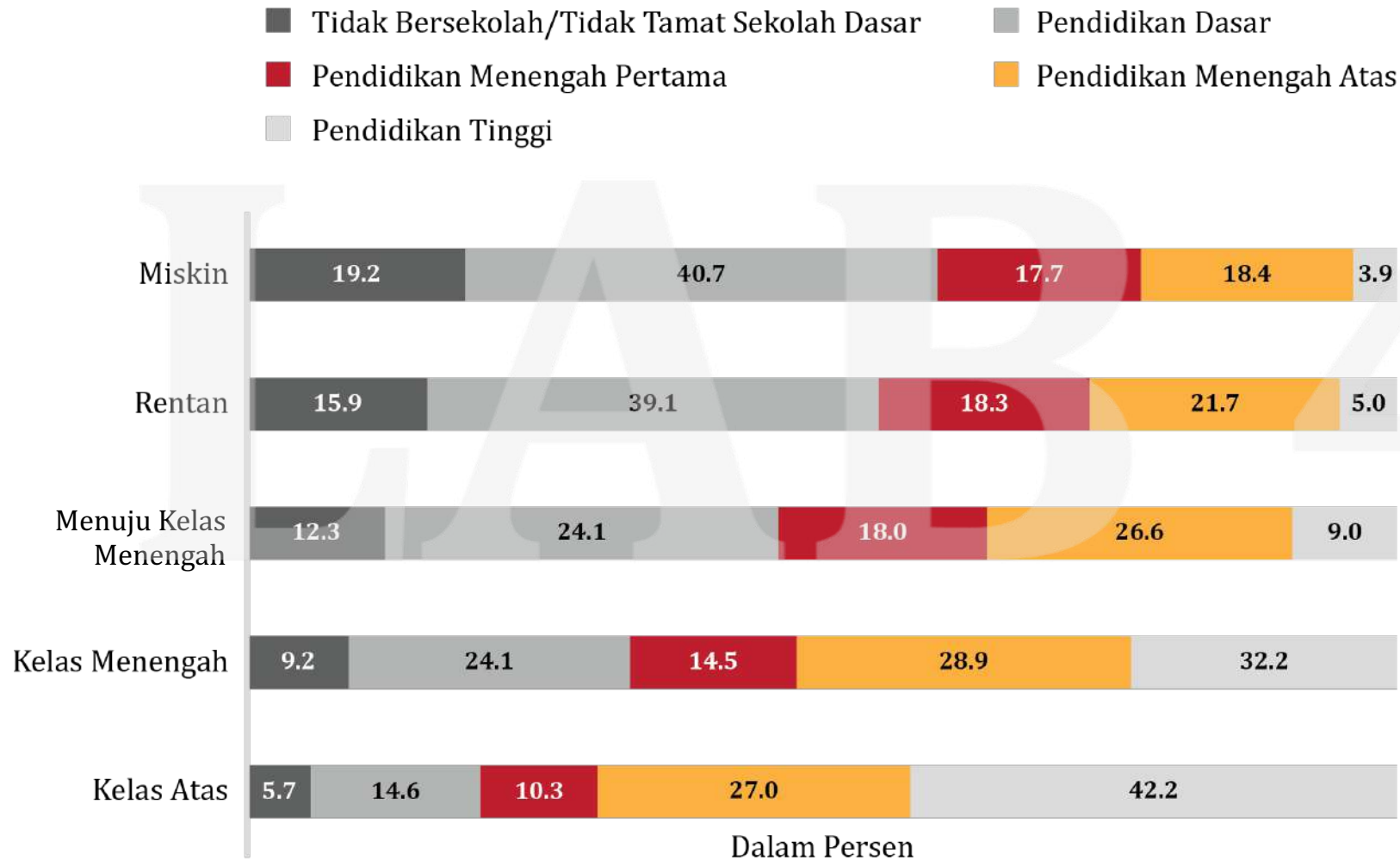
Kelas Menengah dan Wilayah Tempat Tinggal

Komposisi Penduduk Indonesia dan Persentase Kelas Menengah



Dalam kasus Indonesia, **hipotesis yang menyatakan bahwa kelas menengah makin bertambah** seiring dengan **urbanisasi penduduk hanya berlaku pada tahun 2004 hingga 2019**. Akan tetapi, **keberhasilan itu tidak terulang pada tahun 2019 hingga 2024**. Masyarakat perkotaan di Indonesia **sudah mencapai 67% dari total populasi** namun justru **mengalami penurunan kelas**.

Tingkat Pendidikan Berdasarkan Kelas Sosial-Ekonomi

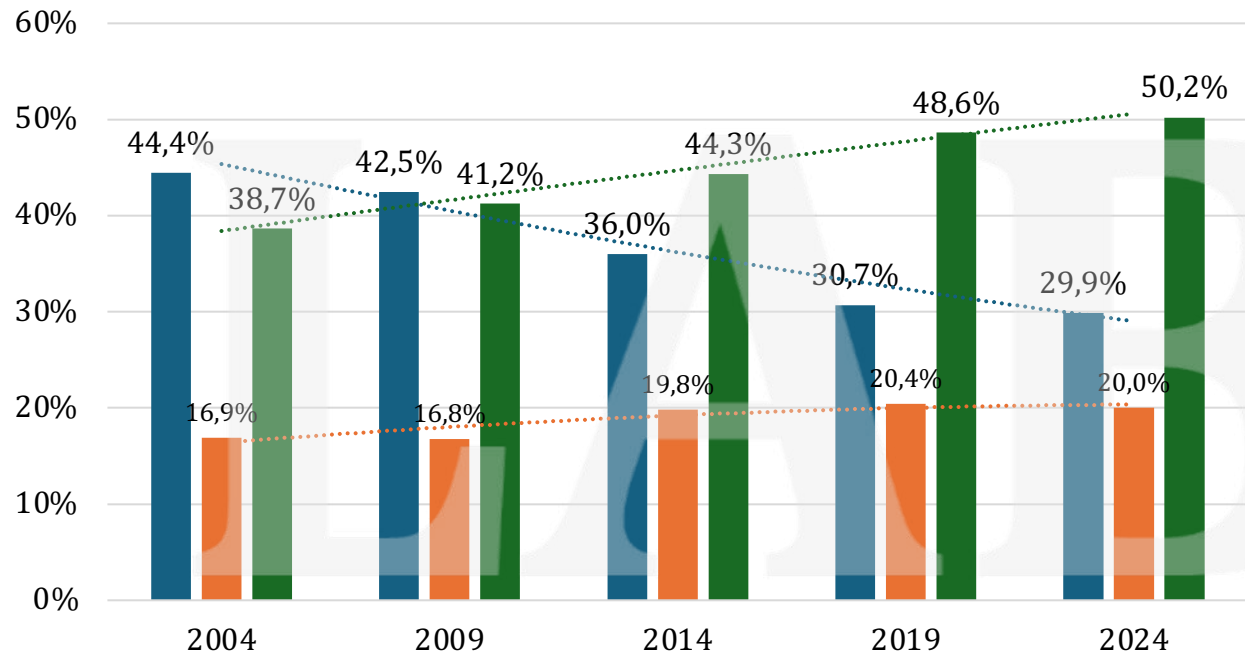


Ketika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa **kelas menengah dan atas didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke atas**. Ketika ditotal, ada **52,1%** anggota kelas menengah yang memiliki ijazah SMA dan Pendidikan Tinggi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa **pendidikan** dapat dipandang sebagai **faktor mobilitas sosial-ekonomi yang memicu individu untuk naik kelas**.

Distribusi Tenaga Kerja Indonesia dan Kelas Menengah

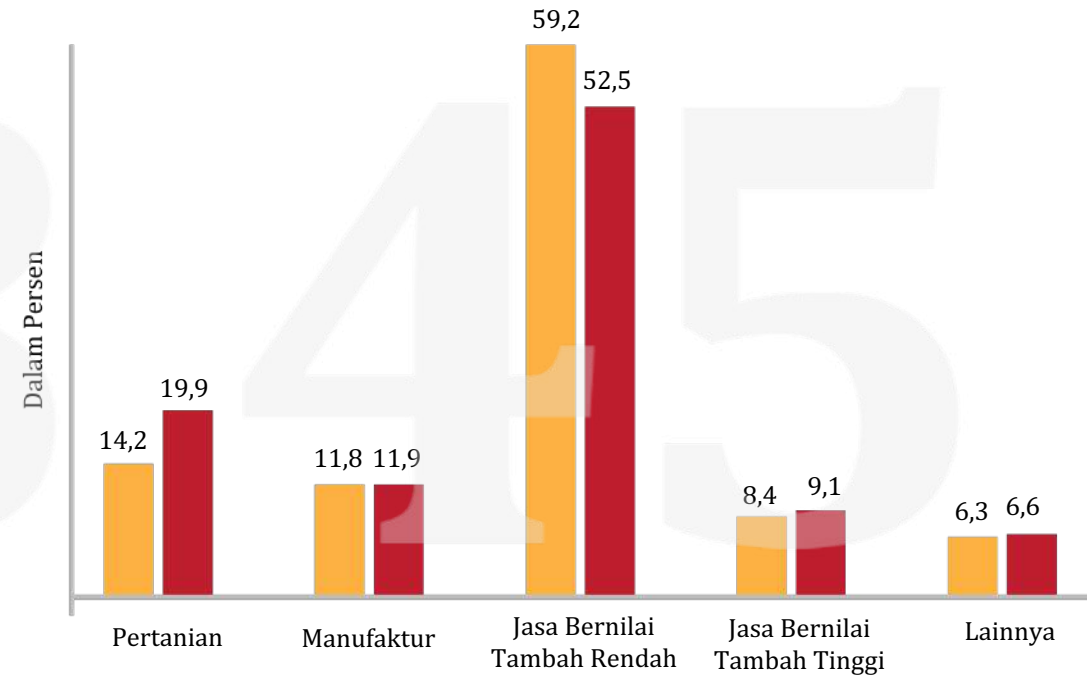
Komposisi Tenaga Kerja

■ Pertanian ■ Industri ■ Jasa



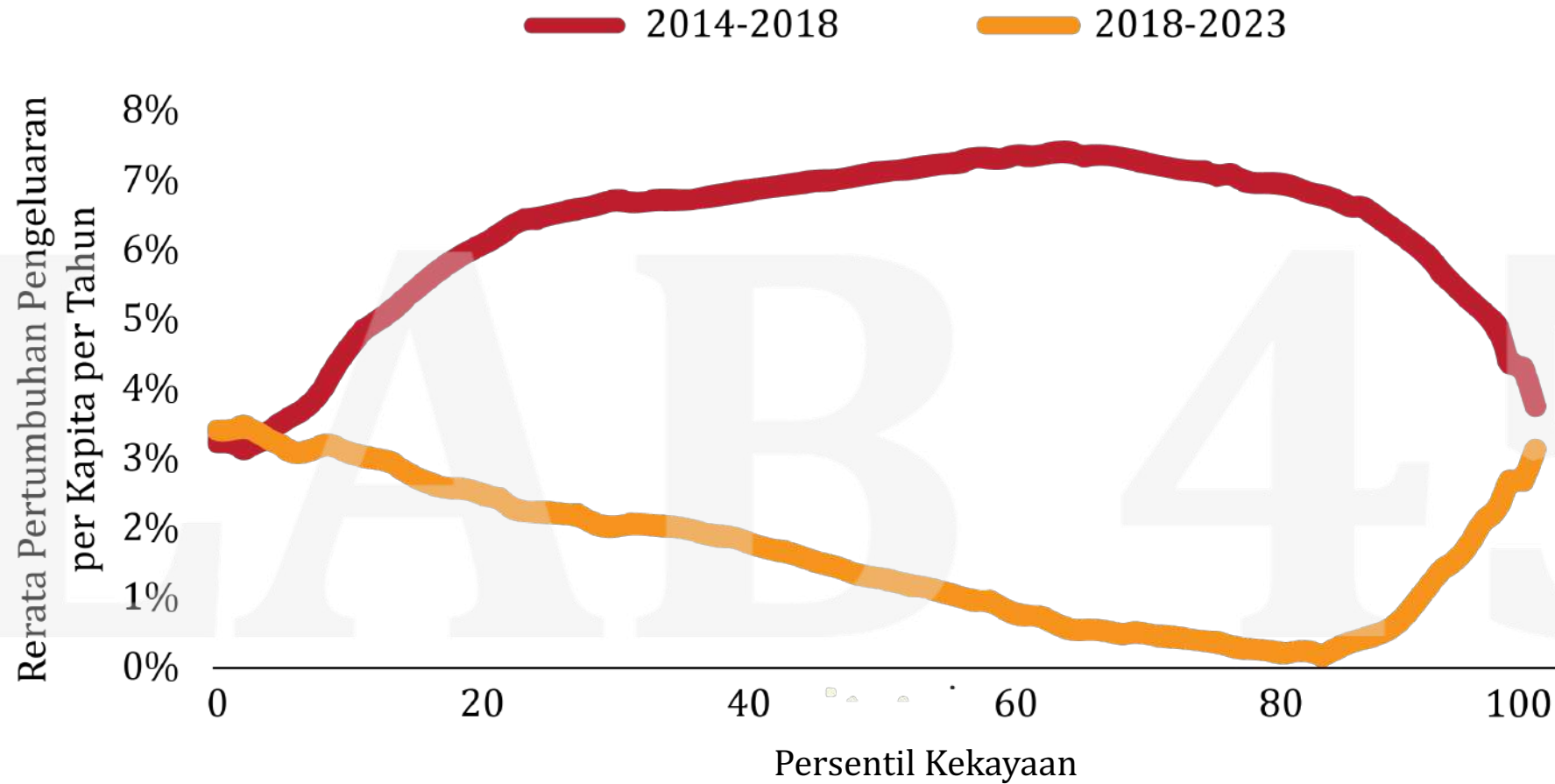
Pekerjaan Kelas Menengah berdasarkan Sektor

■ 2014 ■ 2023



Perbandingan komposisi tenaga kerja menunjukkan bahwa **sektor pertanian terus menurun** seiring dengan **naiknya sektor jasa**. Pada saat bersamaan, **sektor manufaktur tidak pernah mendominasi** penyerapan tenaga kerja sejak tahun 2004 sampai 2024. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari fenomena **deindustrialisasi prematur**. Hal serupa turut terlihat dalam **distribusi pekerjaan kelas menengah** yang didominasi oleh sektor jasa dengan nilai tambah rendah.

Kurva Insidensi Pertumbuhan berdasarkan Distribusi Pendapatan



Berdasarkan agregasi distribusi pendapatan secara rata-rata, tercatat adanya **kenaikan pengeluaran per kapita bagi setiap kelas pendapatan selama periode 2014-2018**. Akan tetapi, hal berbeda terjadi pada periode **2018-2023** di mana **pelemahan pertumbuhan pengeluaran paling banyak terlihat pada persentil 20%-80%**, persentil yang berisikan masyarakat kelas menengah. Penurunan pertumbuhan pengeluaran ini mengindikasikan adanya **penurunan daya beli kelas menengah** sehingga mereka lebih rentan untuk **terjatuh ke kelompok menuju kelas menengah**.

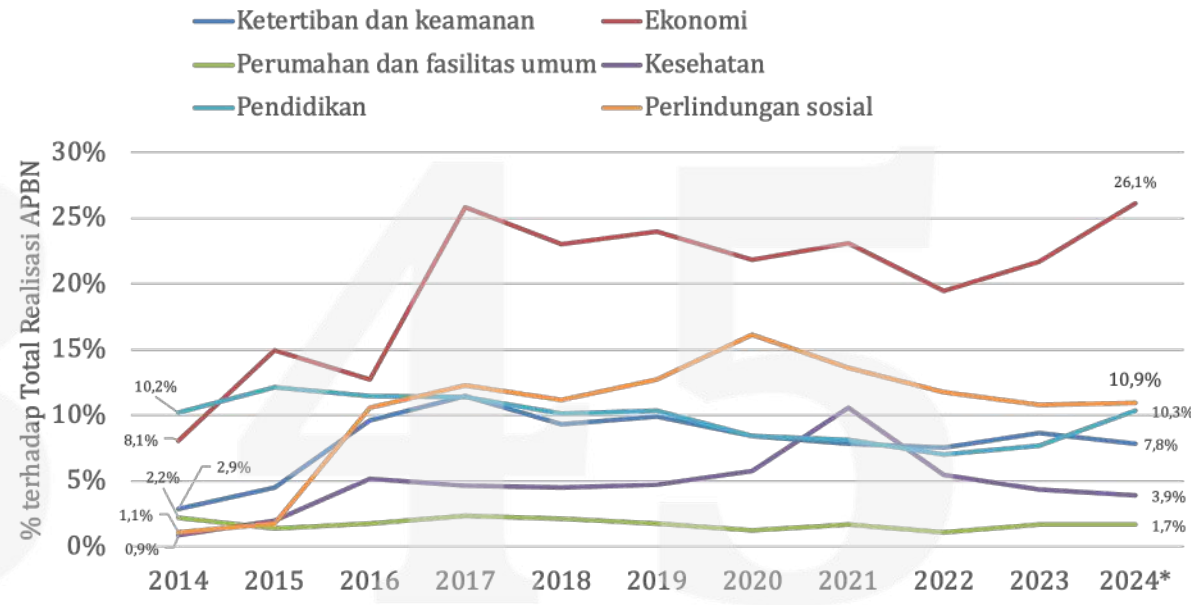
Langkah Transformasi

Langkah Perencanaan Transformasi

Misi Transformasi RPJPN 2025-2045

Misi 1. Transformasi Sosial	Misi 2. Transformasi Ekonomi	Misi 3. Transformasi Tata Kelola
<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan untuk semua Pendidikan berkualitas yang merata Perlindungan sosial yang adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> Iptek, Inovasi, dan produktivitas ekonomi Penerapan ekonomi hijau Transformasi digital Integrasi ekonomi domestik dan global Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi	
<ul style="list-style-type: none"> Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial Stabilitas ekonomi makro Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Beragama maslahat dan berkebudayaan maju Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Lingkungan hidup berkualitas Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim 	

Realisasi APBN Berdasarkan Fungsi

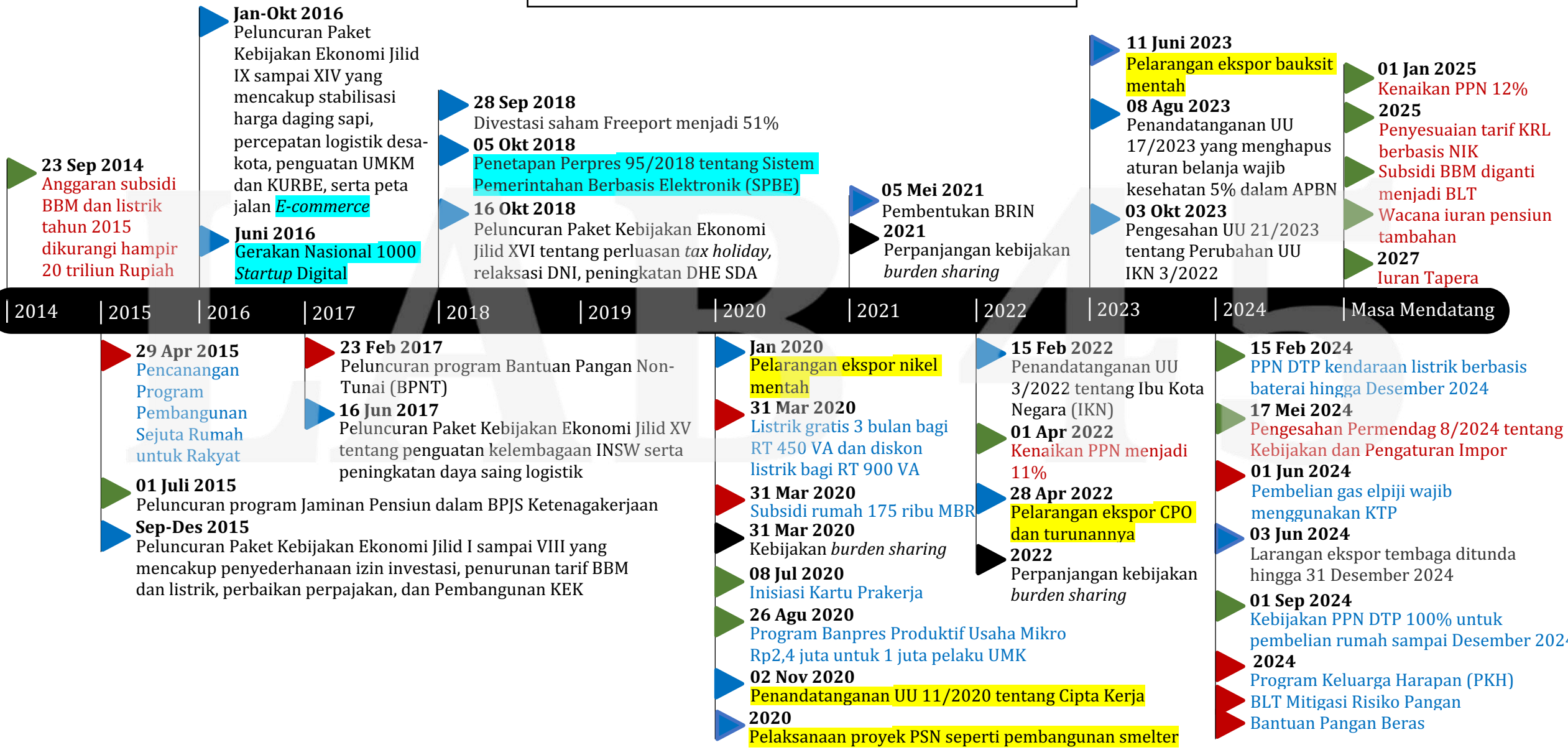


Untuk mencapai Indonesia Emas, pemerintah mencantumkan **misi transformasi pembangunan** di dalam dokumen **RPJPN 2025-2045** yang mencakup **transformasi sosial** (kualitas SDM), **transformasi ekonomi** (struktur perekonomian), dan **transformasi tata kelola** (regulasi). Perubahan struktural ini harus dilakukan untuk melakukan lompatan pembangunan. Menilik realisasi anggaran yang berkaitan dengan tiga misi sebelumnya, **realisasi anggaran ekonomi** dan **perlindungan sosial** menunjukkan kenaikan paling signifikan, pada saat belanja lainnya relatif stagnan.

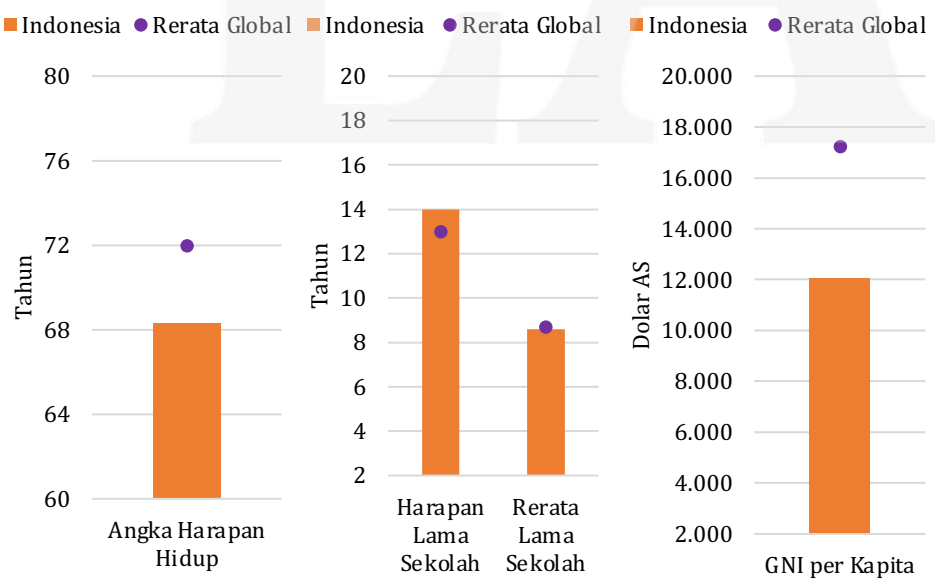
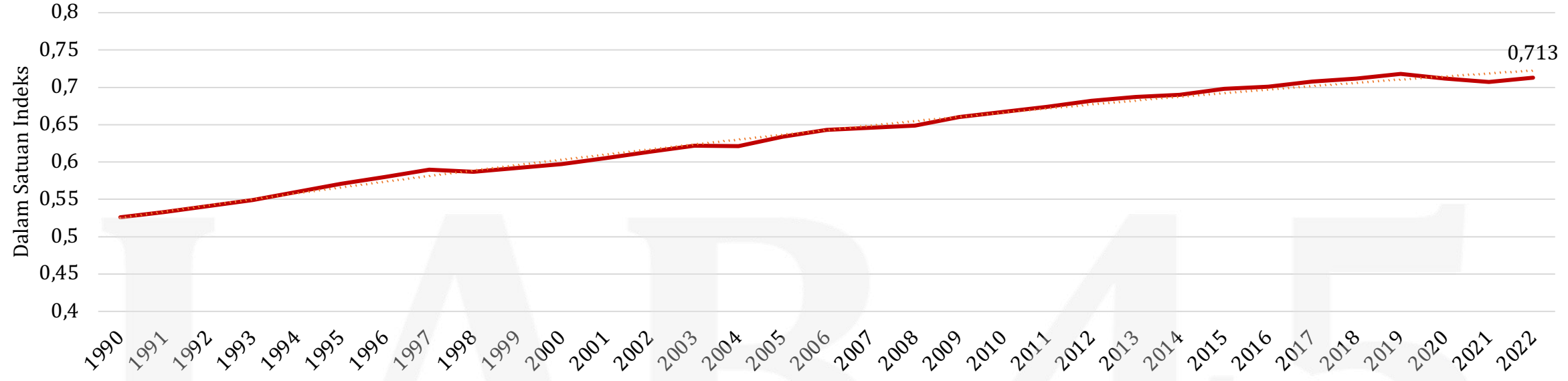
Sumber: Bappenas (2024) dan Kementerian Keuangan (2024)

Kebijakan Ekonomi Era Kepemimpinan Presiden Jokowi

Keterangan: ▶ Transformatif ▶ Memengaruhi Kelas Miskin ▶ Memengaruhi Kelas Menengah



Human Development Index (HDI)

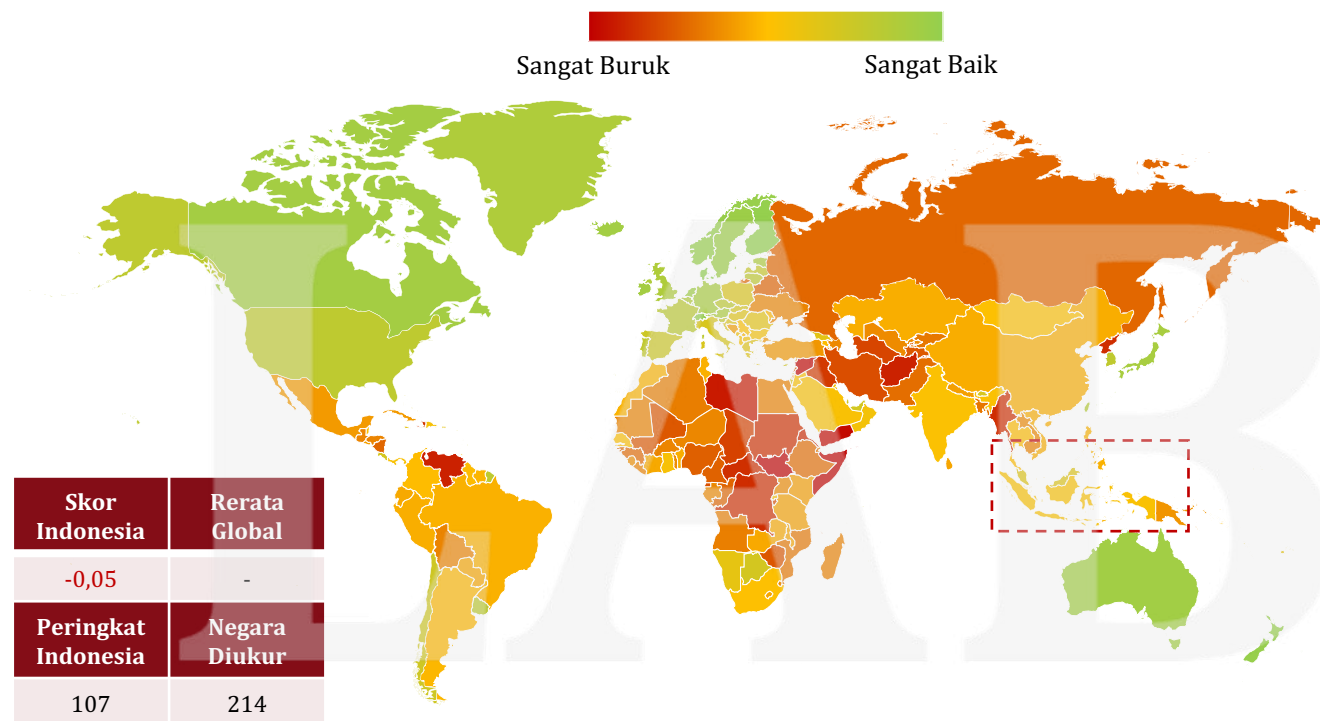


Peringkat	Negara	HDI 2022
1	Swiss	0,967
111	Palestina	0,716
112	Indonesia	0,713
113	Filipina	0,710
193	Somalia	0,380
Rerata Global		0,739

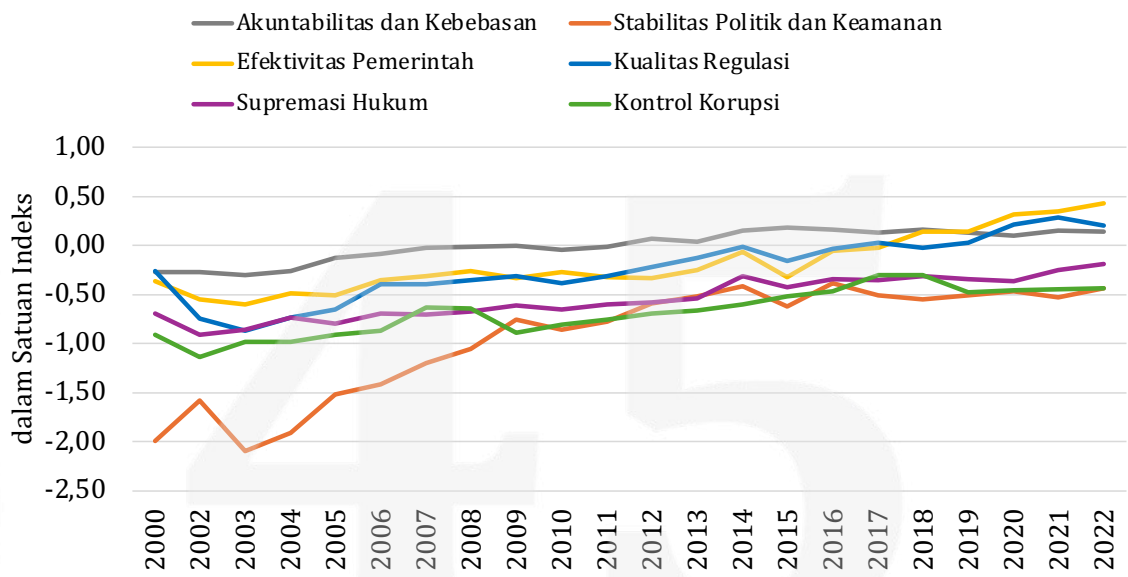
Kualitas manusia yang digambarkan melalui **HDI mengalami perbaikan** meski **masih berada di bawah rerata global**. Meskipun kualitas pembangunan manusia sudah tergolong ke dalam **kategori tinggi**, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konteks **kemajuan pembangunan yang tidak merata**. Guna mengatasi tantangan ini, maka diperlukan **keberpihakan fiskal terhadap upaya pembangunan SDM** melalui **konsumsi sektor publik yang terarah dan efektif**.

Tata Kelola Pemerintahan

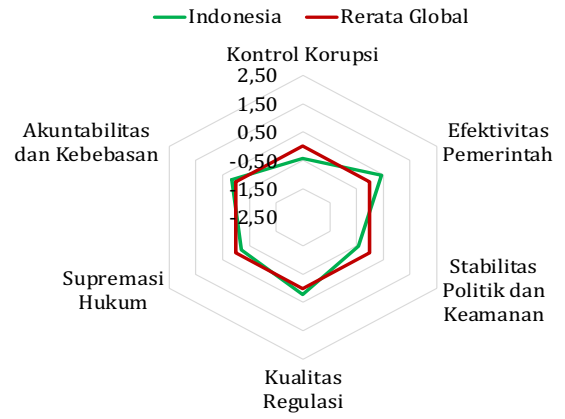
Indonesia Berdasarkan Worldwide Governance Indicators (WGI)



Tren Penilaian WGI Indonesia 2000 s.d. 2022



Posisi Indonesia 2022

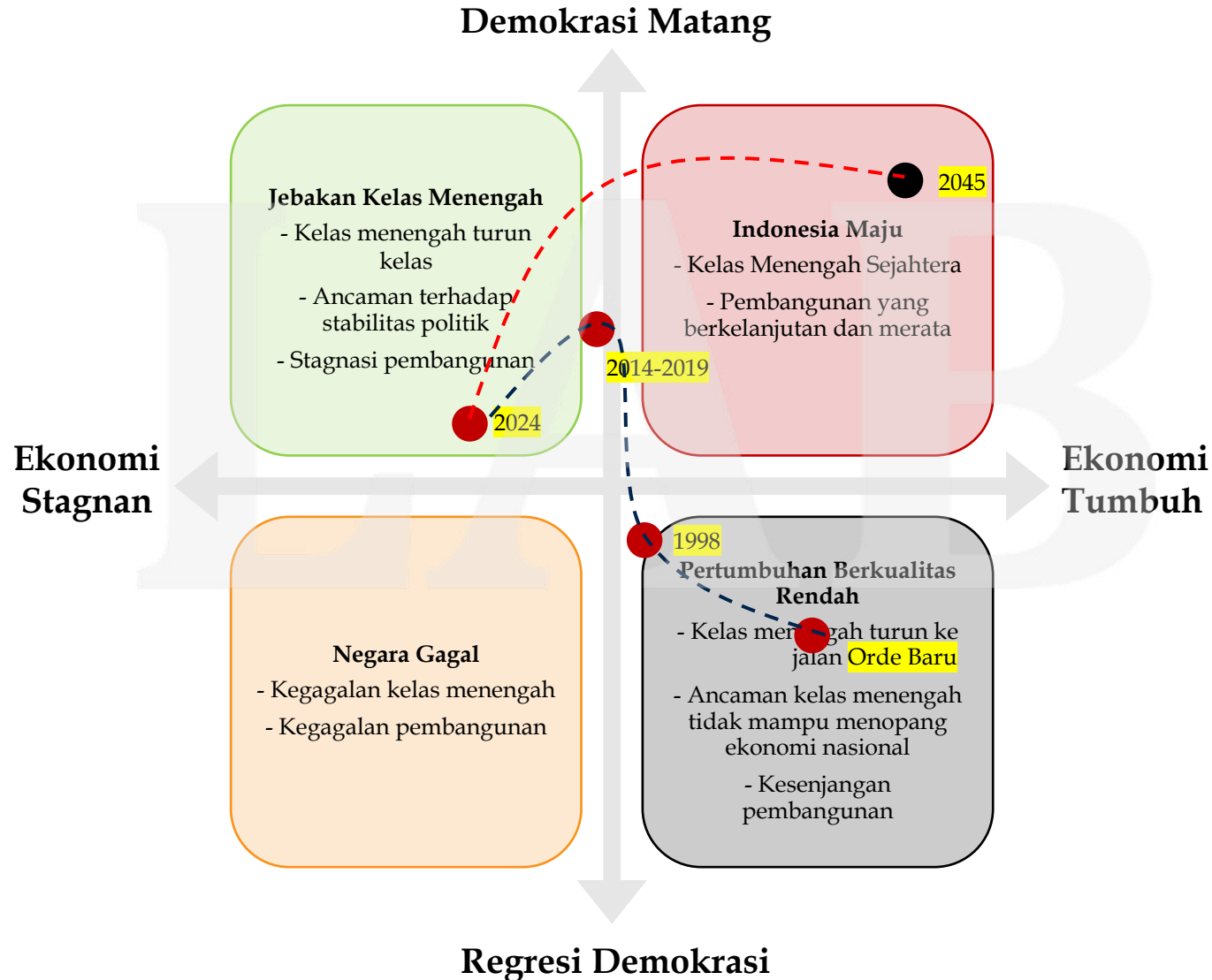


Worldwide Governance Index dari **Bank Dunia** mengukur kualitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan suatu negara. **Bank Dunia** menilai penyelenggaraan pemerintah di **Indonesia** dalam ambang batas **buruk**. Meskipun demikian, dalam kurun 15 tahun terakhir terdapat **perbaikan kinerja** penyelenggaraan pemerintah Indonesia dengan tren positif. Pada tahun 2022, Indonesia memperoleh skor -0,05 yang memosisikan Indonesia di peringkat 107 dari 214 negara.

Sumber: Diolah dari Bank Dunia, *Worldwide Governance Indicators* (2024)

Rekomendasi

Scenario Building Kelas Menengah



Skenario di samping menilai posisi kelas menengah berdasarkan dua variabel yaitu **ekonomi** dan **politik**. Pada posisi awal, **Orde Baru**, Indonesia berada pada kuadran Pertumbuhan Berkualitas Rendah. **Pada 1998**, penilaian dari sisi ekonomi mengalami penurunan, namun dari sisi politik mengalami perbaikan sejalan dengan peristiwa krisis finansial Asia dan kerusuhan yang menjadi klimaks atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru.

Perbaikan terlihat pada capaian nilai tahun **2014-2019**. Pada periode tersebut stabilitas ekonomi dan politik menjadi kondisi ideal bagi peningkatan jumlah kelas menengah Indonesia. Akan tetapi, penilaian kembali mengalami penurunan pada 2024 sejalan dengan fenomena deindustrialisasi prematur yang berlangsung.

Rekomendasi Kebijakan

Ekonomi Maju

Pemerintah mampu menjamin:

1. Pendidikan yang berkualitas dan merata
2. Lapangan pekerjaan bernilai tambah tinggi
3. Standar hidup yang layak, termasuk kesehatan, tempat tinggal, dan transportasi



Demokrasi Matang

Pemerintah mampu mewujudkan:

1. *Good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan kepastian hukum)
2. Pilar demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi

Kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan kelas menengah merupakan opsi yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memastikan **kelas menengah mampu menjalankan peran pentingnya**. Menilik lebih jauh **Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih**, secara umum dokumen **telah memuat** sejumlah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan kelas menengah. Sebagai gambaran, terdapat kebijakan yang berfokus pada sektor **pendidikan** pada poin Asta Cita 4; sektor **lapangan pekerjaan** pada Asta Cita 2, 3 dan 7; sektor **standar hidup yang layak** pada Asta Cita 4 dan Program Jangka Pendek 1; dan sektor **Good Governance dan Demokrasi** pada bagian Misi 1 serta Asta Cita 1, 4, dan 7. Implementasi dari program-program tersebut diharapkan dapat menjadi harapan bagi perbaikan kesejahteraan kelompok menengah ke depan.



TERIMA KASIH